

## (POST)ESTETIKA TENTANG KOTA

Obed Bima Wicandra

Adalah Victor Papanek (1927-1999), seorang filsuf desain yang libertarian, berpikiran alternatif, serta berwawasan lingkungan yang menggulirkan gagasan bahwa semua aktivitas manusia itu adalah desain. Mulai dari bangun tidur hingga merencanakan aktivitas keseharian hingga memilih waktu kapan akan tidur lagi. Dengan pengertian lain, desain yang kemudian menjadi suatu profesi yang menggiurkan (secara ekonomi) untuk dipanggil sebagai desainer adalah wilayah yang tidak terpisahkan dengan problem keseharian di masyarakat.

Dalam pandangan Papanek itulah, maka estetika yang digagas oleh Baumgarten (sejak tahun 1750) menjadi sangat relevan tidak hanya bicara bahwa estetika itu mengenai keindahan (transedental dan keberaturan) atau kegunaan (pragmatis) namun juga kebenaran (*aletheia*). Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran estetik yang utuh, jauh dari muatan kepentingan apapun di balik lahirnya suatu karya (praktis maupun konseptual); jujur; dan yang jelas, tidak berbohong! Estetika di sini yang saya maksud juga bukan hanya mengenai benda *an sich*, namun mengenai substansi. Sebagai contoh, sebagus-bagusnya atau seindah-indahnya konsep perumahan yang didirikan persis di pinggir area konservasi alam yang menjanjikan *view* tumbuh-tumbuhan, berada di puncak gunung, burung yang berkicau maupun bias sinar matahari di pagi hari dan informasinya disebar melalui brosur-brosur dan *billboard*, tetap saja desain yang demikian bukan desain yang estetik bahkan dengan konsep melangit apapun. Mengapa? karena lambat laun, area konservasi alam tersebut akan tergerus juga dengan polusi udara, suara, maupun air akibat pendirian kawasan perumahan tersebut. Inilah yang disebut sebagai kebenaran estetik (*aletheia*).

Tulisan ini ingin mengatakan dalam pandangan lain, bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya yang berujung pada “perseteruan” seharusnya tidak melupakan pada substansinya, yaitu estetika kota. Yang kerap menjadi pertanyaan adalah estetika yang seperti apa dan apakah masih perlu membicarakan estetika bagi Surabaya sekarang ini jika situasinya adalah praktik kuasa ekonomi (pragmatis) yang lebih dominan?

\*\*\*\*\*

Kenaikan pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) jelas pukulan telak bagi pengusaha papan reklame di awal tahun 2011. Namun untuk hal ini saya tidak perlu berkomentar banyak. Artikel berjudul “Mengandaikan Kota Merdeka dari Papan Reklame” adalah komentar saya yang pernah dimuat di Opini Metro pada tanggal 5 Desember 2008. Pembangunan tol tengah kota juga sarat dengan aneka kepentingan dan memiliki potensi melebar kemana-mana tanpa ada tujuan yang pasti. Saya juga tidak perlu mengomentari banyak, karena mulai dari akademisi hingga masyarakat calon terdampak proyek ini telah mengeluarkan sikapnya. Saya hanya peduli pada masalah estetika kota, tidak hanya pada hasil akhir tetapi pada prosesnya. Tentu saja jika menempatkan masalah estetika sebagai perwujudan yang utuh bukan setengah-setengah.

Jika proses mengambil keputusan (seperti yang dilakukan oleh Walikota Surabaya maupun DPRD Kota Surabaya) adalah juga makna dari desain sementara

hasil keputusan yang berupa apakah Perwali, dibentuknya Pansus oleh DPRD, hingga berujung pada upaya pemakzulan walikota itu adalah objek dari hasil desain, maka yang perlu dicermati adalah apakah proses tersebut memenuhi kebenaran secara estetik. Saya tidak sedang memanas-manasi situasi namun saya sepakat pada Victor Papanek, bahwa apakah didasarkan pada hukum tata Negara, ilmu politik maupun komunikasi politik, namun dalam *angle* yang lain, jika semua bicara mengatasnamakan rakyat, maka tentu saja kebenaran estetika itu yang penting untuk dicermati.

Dalam pemikiran kontemporer sekarang, tentu saja keindahan tidak saja dimaknai sebagai keberaturan komposisi. Termasuk di sini keberaturan bertutur, mengambil keputusan, berargumentasi, dan menyatakan kepentingan. Pemikiran kontemporer yang sekarang terjadi juga melihat kesemrawutan termasuk dalam keindahan. Maka muncullah kemudian istilah-istilah keren yang sekadar memenuhi hasrat *fashion* yang berlagak sok ilmiah dengan menambahkan kata “de” dan “post”. Dalam perjalanannya, justru pemikiran alternatif ini membalikkan pendapat umum yang sepertinya menandai era matinya keberaturan (estetika). Justru dalam pemikiran inilah diletakkan bagaimana dalam era “de” dan “post”, estetika dioperasionalkan. Dengan kata lain menurut Foucault (1966), kode-kode kultural yang kita gunakan untuk menghayati realitas maupun tatanan-tatanan wacana yang kita ikuti (kita mengetahuinya dari berita di media), sesungguhnya bukanlah sesuatu yang alamiah dan pasti, melainkan sesuatu yang sebetulnya "acak" dan sangat ditentukan oleh sejarah: karena itu selalu bisa dikritik dan direvisi (dalam *The Order of Things*). Maka di sinilah era post-estetik menjadikannya tidak dimaknai sebagai matinya estetika, namun bagaimana semua menjadi tampak terbuka, demokratis, dan tidak anti kritik bukannya malah asal-asalan, pengabaian, atau gelap mata.

“Perseteruan” wakil rakyat dan walikota adalah objek visual yang sedang kita lihat akhir-akhir ini. Mereka memiliki kemiripan yang hampir sama. Wakil rakyat *ngubek-ngubek* Perwali perihal kenaikan pajak reklame serta upaya meloloskan ide pembangunan jalan tol tengah kota. Mereka membongkar sesuatu yang tampak sudah mapan atau dengan kata lain mereka sudah mapan dengan aturan yang sudah ada. Pikirnya jika ada reklame yang ambruk tinggal memanggil pemasang iklannya dan selesai. Perihal jalan tol tengah kota mereka juga membongkar hal yang sudah mapan. Jalanan Surabaya yang *lempeng* akan lebih bagus dan lebih terkesan modern jika ada jalan tol tengah kotanya. Ibu Walikota pun juga melakukan pembongkaran-pembongkaran pemikiran yang sudah mapan. Reklame harus ditertibkan dan diminimalisasi salah satunya dengan kenaikan pajak. Tol tengah kota pun ditolak sebagai tanda dari keberaturan yang dulu sudah diawalinya lewat taman-taman kota.

Namun jika dilihat dari kebenaran estetika (*aletheia*), maka tampak di sini bahwa secara ekonomi politik, para anggota dewan lebih banyak diuntungkan, karena banyak sekali kepentingan yang menunggangi mereka dibandingkan walikota yang dalam hal ini banyak dirugikan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa anggota dewan itu juga banyak yang menjadi pengusaha di Surabaya, sementara walikota sudah mengawali untuk penataan kota sejak menjadi kepala Bapekko. Terlihat di sini, bahwa kebenaran estetika itu lebih banyak dipunyai oleh walikota daripada anggota dewan. Kebenaran estetika yang tanpa banyak kepentingan yang mendominasi dari siapapun kecuali menjadikan wajah kota Surabaya yang lebih manusiawi. Mulailah dari sekarang untuk berargumentasi secara jujur atau dengan bahasa ungkap lain adalah jangan berbohong!\*\*\*

\* dosen Estetika di DKV UK Petra Surabaya